

BAB II

SEJARAH HUBUNGAN KERJASAMA INDONESIA-TIONGKOK

A. Hubungan Indonesia- Tiongkok dari Kepemimpinan Presiden Sukarno Hingga Jokowi

Indonesia merupakan negara ASEAN terbesar dan memiliki hubungan luar negeri yang cukup luas. Politik luar negeri yang bebas aktif merupakan prinsip hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain. meskipun dalam prakteknya, kondisi politik dan kepemimpinan dalam negeri juga turut berperan penting dalam pengambilan kebijakan luar negeri Indonesia.

Berbicara tentang hubungan bilateral Indonesia –Tiongkok, dalam sejarahnya telah berlangsung sejak kedua negara merdeka. Berbagai dukungan dan kerjasama antar kedua negara dibangun sejak kepemimpinan presiden Sukarno. Ada berbagai macam perjanjian dan kerjasama yang telah dicapai oleh kedua negara, meskipun dalam prakteknya hubungan kedua negara tidak selamanya berjalan baik dan mengalami pasang surut. Indonesia-Tiongkok pernah melakukan pemutusan hubungan diplomatik yang berdampak pada pemberhentian berbagai macam kerjasama. Konflik Laut Cina Selatan juga menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi hubungan kedua negara.

Berawal dari kepemimpinan presiden Sukarno, tepatnya pada tanggal 9 Juni 1950, Indonesia resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok.

Pembukaan hubungan diplomatik ini dilakukan beberapa bulan setelah terbentuknya Republik Rakyat Tiongkok. Pembukaan hubungan diplomatik Indonesia -Tiongkok menjadi awal dilakukannya berbagai perjanjian dan berbagai macam kerjasama antar kedua negara. Pada November 1953, perjanjian perdagangan Indonesia –Tiongkok pertama kali ditandatangani di Beijing. Dan ketika Konferensi Asia Afrika (KAA) pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955, Tiongkok turut serta dalam konferensi ini dan langsung dihadiri oleh Perdana Menteri Tiongkok saat itu, Zhou Enlai. Pada kunjungan ini, Zhou Enlai juga menandatangani perjanjian dwi kenegaraan Indonesia- Tiongkok. Hubungan diplomatik ini terus berlanjut dan diwarnai dengan saling kunjung antar pihak pemerintah (Sinaga, 2013).

Pada tanggal 30 September 1965, terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang membuat hubungan Indonesia –Tiongkok menjadi renggang, puncaknya 30 Oktober 1967 kedua negara melakukan pembekuan hubungan diplomatik. Pembekuan hubungan diplomatik Indonesia -Tiongkok saat itu juga dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri Indonesia, dimana paska pemberontakan PKI terjadi pergantian presiden Indonesia dengan Suharto sebagai presiden Indonesia yang baru. Pembekuan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Tiongkok berlangsung selama 23 tahun.

Alasan pemerintah Indonesia membekukan hubungan diplomatik dengan Tiongkok disebabkan pemerintah (Suharto) menyalahkan Tiongkok karena mendukung usaha kudeta yang dilakukan partai komunis Indonesia di tahun 1965 (Roy, 1998). Normalisasi hubungan Indonesia –Tiongkok berawal ketika Presiden

Suharto menghadiri pemakaman Kaisar Hirohito pada 24 Februari 1989, pada kesempatan ini juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok saat itu Qian Qichen. Pembahasan tentang normalisasi hubungan kedua negarapun mulai dilakukan.

Normalisasi hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok dimulai pada tahun 1989, dimana pada 4 Oktober 1989, pembahasan terkait normalisasi hubungan Indonesia-Tiongkok dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Qian Qichen di Tokyo. Dan pada 3 Juli 1990, kedua menteri luar negeri menandatangani Komunike Bersama "*The Resumption of The Diplomatic between The Two Countries*" di Beijing. Penandatanganan Komunike Bersama ini diikuti kunjungan Perdana Menteri Li Peng ke Indonesia yang sekaligus menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Pemulihan Hubungan Diplomatik kedua negara pada 8 Agustus 1990.

Pemulihan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok juga tidak terlepas dari politik dalam negeri Tiongkok. Titik balik dari perubahan politik luar negeri Tiongkok terjadi setelah insiden Tiananmen di tahun 1989. Pemberian sanksi diplomatik dan ekonomi dari negara-negara barat membuat Beijing harus menghadapi isolasi dari komunitas internasional. Tiongkok kemudian mulai mengubah kebijakan politik luar negerinya terutama di wilayah Asia. Salah satu dampaknya yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Indonesia di tahun 1990 (Zhao, 2004).

Pasca normalisasi hubungan diplomatik Indonesia –Tiongkok, presiden Suharto malakukan kunjungan ke Tiongkok pada tanggal 14-18 November 1990,

dan menyaksikan penandatanganan pembentukan Komisi Bersama Bidang Ekonomi, Perdagangan, dan Kerja Sama Teknik (Utami, 2015). Kunjungan presiden Suharto ke Tiongkok juga dibalas dengan kedatangan presiden Tiongkok Yang Shangkun ke Jakarta pada 1991 (Tiongkok, 2012).

Pada tahun 1998 terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada demo besar-besaran masyarakat Indonesia yang menginginkan mundurnya Suharto sebagai presiden Indonesia. Para demonstran juga menyasar masyarakat dan pebisnis keturunan Tiongkok yang disebabkan kemarahan atas status ekonomi etnis Tiongkok yang lebih baik dari pribumi (Turner & Allen, 2007)

Setelah presiden Suharto lengser, Habibie diangkat menjadi presiden Indonesia selanjutnya. Naiknya Presiden Habibie merupakan sebuah transisi proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri Indonesia, namun masa pemerintahannya sebagian besar masih terfokus perihal peningkatan citra Indonesia di lingkup internasional. Hubungan Indonesia-Tiongkok di era Habibie belum begitu terlihat, hal ini disebabkan masa pemerintahan yang hanya berlangsung selama setahun.

Indonesia kemudian dipimpin oleh presiden Abdul Rahman Wahid atau biasa dikenal dengan nama Gusdur. Pemikiran Gusdur tentang sentiment anti barat di Indonesia yang diikuti perasaan merendahkan diri karena diawasi IMF selama krisis finansial, terlepasnya Timor-Timur yang diikuti intervensi Australia dan tentara PBB membuat Gusdur beralih ke Tiongkok. Tindakan Gusdur yang beralih ke Tiongkok di sebut dengan istilah "*Asia First*" atau strategi politik luar negeri Asia yang pertama (Nabbs-Keller, 2011). Di era Presiden Abdurrahman

Wahid (Gusdur), hubungan Indonesia –Tiongkok mulai memasuki babak baru dan jauh lebih baik dari sebelumnya. Hal ini terbukti ketika pertama kali di lantik, negara pertama yang dikunjungi oleh Gusdur adalah Tiongkok. Di era pemerintahan Gusdur, Imlek dijadikan hari libur nasional dan hak-hak warga Indonesia keturunan Tionghoa mulai dijamin oleh negara. Gusdur bahkan mengusulkan pembentukan poros Jakarta –Beijing -New Delhi. Dalam lawatannya ke Tiongkok pada 1-3 Desember 1999, Gusdur mengatakan bahwa *"Tiongkok negara besar dengan potensi kekuatan ekonomi yang besar. Jadi, kita justru rugi jika tidak berhubungan dengan Tiongkok,"*.

Paska pergantian presiden Gusdur dengan Megawati Sukarno Putri, hubungan antara Indonesia Tiongkok terus ditingkatkan. “Diplomasi dansa” merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan hubungan kerjasama dengan Tiongkok. Hubungan kerjasama Indonesia-Tiongkok terus berlanjut hingga ke presiden selanjutnya yaitu presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden SBY merupakan presiden Indonesia yang begitu fokus pada politik luar negeri dan citra Indonesia di dunia.

Selama dua periode kepemimpinan SBY, terjadi peningkatan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, hal ini terbukti dengan banyaknya perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara dan SBY menjadikan Tiongkok sebagai mitra strategis Indonesia. Kerjasama Indonesia-Tiongkok yang sudah dibangun, semakin dikelola dengan baik oleh SBY. Kerjasama yang dilakukan kedua negara tidak hanya terjadi di bidang ekonomi dan politik saja, namun juga

dalam berbagai bidang seperti dalam bidang pertahanan hingga pariwisata (Lalisang, 2014).

Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia saat itu Lan Lijun dalam wawancaranya dengan *China Radio Internasional* mengatakan bahwa “*Tiongkok dan Indonesia sama-sama adalah negara besar yang banyak jumlah penduduknya, potensi pasarnya besar, dan dapat saling melengkapi di bidang ekonomi, prospek kerja sama antara kedua negara sangat luas. Di atas dasar nilai perdagangan bilateral pada tahun 2004 yang mencapai 13 miliar 480 juta dolar AS, nilai perdagangan bilateral untuk 10 bulan pertama tahun 2005 telah mencapai 14 miliar dolar AS, dan diperkirakan akan mencapai 18 miliar dolar AS sepanjang tahun 2005, dan bisa menciptakan rekor tinggi yang baru*” (Lijun, 2006).

Secara administratif, presiden SBY sejak tahun 2005 telah menandatangani kesepakatan ‘*Strategic Partnership*’ dengan Tiongkok di Beijing. Kesepakatan ini membuat kerjasama Indonesia-Tiongkok semakin luas dan tidak hanya bergerak dalam bidang ekonomi saja tapi juga dalam bidang politik, keamanan, pertahanan, hukum, hingga kerjasama dalam bidang sosial budaya. Hubungan kerjasama ini kemudian ditingkatkan, tepatnya pada Januari 2010, dilakukan ratifikasi untuk lima tahun rencana kerja atau “*five year plan of action*” yang bertujuan sebagai mekanisme dialog bilateral pada teknis kerjasama di tingkat urusan regional dan internasional serta untuk menyusun rencana pembiayaan kerjasama” .

Setelah memimpin selama dua periode, SBY kemudian digantikan oleh presiden Jokowi. Di era kepemimpinan Jokowi, hubungan Indonesia- Tiongkok menjadi semakin dekat jika dibandingkan dengan kepemimpinan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Di era kepemimpinan Jokowi, Tiongkok memiliki posisi penting dalam politik luar negeri Indonesia. Berbagai macam perjanjian dan kerjasama dilakukan dengan Tiongkok pada era kepemimpinan Jokowi terutama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Dari sektor ekonomi dan perdagangan, hubungan kerjasama kemudian diperluas lagi dalam berbagai bidang.

Agar semakin memperjelas penjelasan terkait hubungan kerjasama Indonesia -Tiongkok, penulis akan mencoba menjabarkan lebih rinci penjelasan tentang beberapa bentuk kerjasama Indonesia-Tiongkok terutama dalam bidang ekonomi, perdagangan, hukum, keamanan dan penjelasan singkat kerjasama dalam bidang kebudayaan, pendidikan dan teknologi.

B. Kerjasama Indonesia – Tiongkok dalam Berbagai Bidang

1. Kerjasama Indonesia –Tiongkok dalam Bidang Ekonomi dan Perdagangan

Ekonomi merupakan salah satu alasan utama mengapa suatu negara mau bekerjasama. Di era globalisasi dewasa ini, kemudahan dalam bertransaksi dan sistem transportasi yang memadai membuat proses ekspor maupun impor barang dari satu negara ke negara lain menjadi sangat cepat dan mudah. Dampaknya banyak negara yang memulai hubungan kerjasama dalam berbagai bidang

umumnya berawal dari kerjasama ekonomi. Bahkan perkembangan di level ekonomi dan industri suatu negara dapat di pergunakan untuk mengejar tujuan politik luar negerinya (Charles W.Kegley & R.Wittkopf, 1999).

Pada tahun 2011 lalu, dalam acara 2011 *Academic Summer Program* di Tiongkok, ketika para peserta menanyakan tentang bagaimana perbandingan hubungan perdagangan Indonesia-Tiongkok dan Indonesia-Amerika, Dubes Indonesia saat itu Imron Cotan menyampaikan bahwa sesuai dengan kepentingan nasional dan politik luar negeri Indonesia yang pragmatis, hubungan Indonesia-Tiongkok lebih diarahkan untuk menggali potensi kerjasama saling menguntungkan dan berimbang di bidang ekonomi, dan tidak akan *compromising* hubungan Indonesia-Amerika dengan pertimbangan yang nyata bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan adidaya yang eksistensi dan peranannya sangat berpengaruh terhadap kepentingan geo-strategis dan geopolitik Indonesia secara bilateral maupun multilateral (Nafed, 2011).

Tiongkok merupakan mitra dagang yang penting bagi Indonesia, begitupun sebaliknya. Dalam sektor ekonomi, ketersediaan sumber daya alam, tenaga kerja yang murah hingga jumlah populasi penduduk yang terbilang cukup banyak menjadikan Indonesia memiliki keunggulan tersendiri bagi kerjasama ekonomi antara Indonesia-Tiongkok. Disisi lain Tiongkok memainkan berbagai peran sebagai konsumen, penyalur, pesaing, pembaharu *innovator* dan penyedia sumber daya manusia yang handal. Hal tersebut dibuktikan dengan kemajuan ekonomi yang terus meningkat tiap tahunnya (Marisa, 2013).

Dengan saling bekerjasama di bidang ekonomi akan memberikan keuntungan bagi masing-masing negara. Jenis komoditas ekspor dan impor antara Indonesia-Tiongkok juga beragam, mulai dari produk pertanian seperti minyak kelapa sawit hingga produk pertambangan seperti batu bara, bijih tembaga, bijih nikel dan bijih besi. Dalam bidang investasi, Tiongkok merupakan investor yang cukup berpengaruh di Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh pengusaha hingga pemerintah Tiongkok juga ada diberbagai bidang di Indonesia, contohnya investasi di bidang energi, pembangunan rekonstruksi rel kereta api berkecepatan tinggi, energi, maritim, pariwisata, dan pengembangan pembangunan industri pelabuhan.

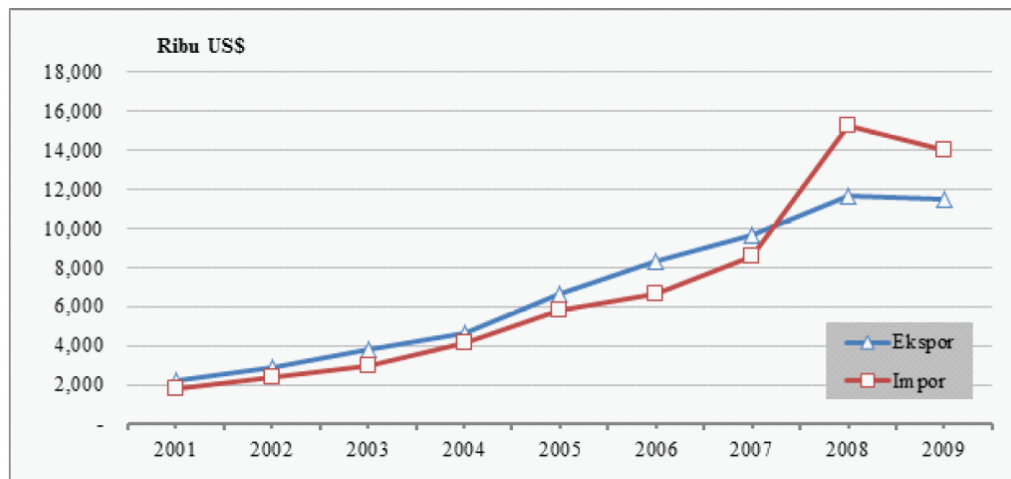
Selain kerjasama secara bilateral, Indonesia -Tiongkok juga melakukan kerjasama multilateral. Hal ini terbukti dengan keanggotaan kedua negara dalam beberapa organisasi ekonomi dunia seperti ; WTO (*World Trade Organization*), ACFTA (ASEAN–China Free Trade Agreement), ASEAN+3, dan APEC Asia-Pacific Economic Cooperation , OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Keanggotaan kedua negara dalam berbagai organisasi ekonomi dunia semakin menjelaskan tujuan ekonomi yang sama antara Indonesia-Tiongkok.

Dampak dari kesepakatan dan perjanjian dalam organisasi ekonomi yang diikuti membuat hubungan kerjasama ekonomi Indonesia-Tiongkok semakin intensif. Sebagai contoh sejak diterapkannya ACFTA pada 2010 lalu, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mengalami kenaikan. Total perdagangan kedua belah terus meningkat secara signifikan sejak ASEAN dan

Tiongkok menyetujui untuk mengimplementasikan EHP (*Early Harvest Program*) yang mulai berdampak diawal tahun 2005. Pada tahun 2003, perdagangan antara Indonesia -Tiongkok mencapai 3,8 milyar dolar Amerika dan terus mengalami kenaikan sejak 2006 dan di akhir tahun 2009 menjadi 10,5 milyar dolar Amerika (Chandra & Lontoh, 2011).

Dari perspektif Tiongkok, sejak 2010, ASEAN telah menjadi salah satu dari empat *partner* besar perdagangan setelah Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Diantara anggota ASEAN, Indonesia adalah salah satu dari empat *partner* besar Tiongkok yang berdasarkan data pada bulan Mei 2010 dari kementerian perdagangan Republik Rakyat Tiongkok yang mencapai 12,4 milyar dolar Amerika sesudah Malaysia (22,2 milyar dolar Amerika), Singapura (17,9 milyar dolar Amerika) dan Thailand 15,7 milyar dolar Amerika). Antara tahun Mei 2009 dan Mei 2010, departemen dari urusan Asia kementerian perdagangan Tiongkok juga mencatat bahwa, terjadi defisit perdagangan dari 5,95 milyar dolar Amerika, Tiongkok melihat terjadi kenaikan sebanyak 57,7 persen pada nilai ekspor ke Indonesia dan 92,1 persen kenaikan nilai impor dari Indonesia (*Ibid*).

Secara grafik, Selama periode 2001-2009, kinerja perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok menunjukkan kecenderungan peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh Grafik pada gambar 1.1. Namun pada periode tersebut, laju pertumbuhan ekspor Indonesia lebih rendah (23,6 persen per tahun) daripada laju pertumbuhan impor (30,9 persen per tahun). Terlebih, sejak tahun 2008, kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit, lebih dari 20,0 persen dari nilai ekspor pada tahun berjalan (ILO Indonesia, 2013)



Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (Diolah, 2010)

Gambar.2.1 Neraca Perdagangan Indonesia dan Tiongkok, 2001-2009

Ditahun selanjutnya, berdasarkan data Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, pada tahun 2014, Tiongkok masih menempati posisi kedua sebagai negara tujuan ekspor Indonesia. Jenis barang yang di ekspor Indonesia ke Tiongkok sendiri mulai dari ekspor non migas yang mencapai 1,29 milyar dolar AS hingga ekspor produk karet pada periode Januari-Juli mencapai capaian sebesar 16,51% atau lebih dari 9,39 milyar dollar AS (Siswaningsih, 2014). Ditahun yang sama (2014) impor Indonesia terbesar berasal dari Tiongkok yaitu sebesar 30.624,3 juta dolar AS (Badan Pusat Statistik, 2015).

Pada tahun 2015, Tiongkok masih menjadi tujuan utama ekspor non migas Indonesia di urutan ketiga, setelah Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pangsa pasar Indonesia ke Tiongkok mencapai US\$ 6,65 miliar atau 9,37 persen. Ekspor Indonesia ke Tiongkok pada Agustus 2015 tidak mengalami pertumbuhan berarti dengan nilai ekspor non migas sebesar US\$1,111 miliar atau hanya naik 0,57 persen dibanding kinerja ekspor ke negara tersebut pada Juli 2015 sebesar

US\$1,105. Sedangkan impor Indonesia dari Tiongkok pada periode yang sama justru melonjak hingga 39,71 persen dengan nilai impor non migas Agustus sebesar 2,516 miliar USD, sedangkan pada Juli 2015 mencapai 1,801 miliar USD. Untuk tahun 2015, Impor Indonesia yang paling besar ke Tiongkok adalah mesin peralatan mekanik dan peralatan listrik.

Investasi Tiongkok di Indonesia juga mengalami peningkatan, tepatnya pada Maret 2015 lalu, diadakan Forum Kerja Sama Ekonomi Indonesia -Tiongkok di Beijing yang dihadiri sekitar 500 pengusaha dan pada forum ini juga dihadiri Presiden Jokowi. Kunjungan Presiden Jokowi ke Tiongkok menghasilkan komitmen investasi senilai US\$ 40 miliar (Rp 521,5triliun), yang jika terealisasi akan menjadikan Tiongkok sebagai salah satu investor asing terbesar di Indonesia (Lumanauw, 2015). Peningkatan kerjasama ekonomi berdampak pada pengembangan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang dan salah satunya ialah dalam bidang hukum dan keamanan.

2. Kerjasama Indonesia Tiongkok dalam bidang Hukum dan Keamanan

Tingkat kriminalitas lintas negara yang semakin tinggi setiap tahunnya mengakibatkan setiap negara perlu meningkatkan keamanan negaranya. Ada begitu banyak jenis kejahatan lintas negara yang tentu membutuhkan kerjasama yang intensif antar negara untuk menangani kejahatan yang terjadi hampir setiap harinya. Berbagai forum keamanan hingga organisasi dibentuk dan telah menghasilkan berbagai macam kesepakatan baik dalam bentuk perjanjian hukum hingga agenda rutin untuk membahas masalah kejahatan internasional dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral.

Dalam prakteknya, Indonesia -Tiongkok telah melakukan kerjasama di bidang hukum dan keamanan baik secara bilateral maupun multilateral. Secara bilateral contohnya, secara rutin Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Polisi Hukum dan Keamanan RI dan *State Councilor* Tiongkok melakukan dialog bilateral, kegiatan ini merupakan pelaksanaan salah satu butir Deklarasi Bersama Kemitraan Strategis Indonesia -Tiongkok yang ditandatangani 25 April 2005 lalu (Utami, Indonesia-Tiongkok sepakat tingkatkan kerja sama keamanan, 2016). Isu yang dibahas dalam dialog bilateral Indonesia -Tiongkok berupa upaya-upaya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan, hukum serta kerja sama maritim.

Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia dan Tiongkok melakukan penandatanganan kesepahaman kerjasama dalam bidang hukum. Lingkup pertukaran informasi mengenai kelembagaan dan masalah-masalah pertahanan, pertukaran para pejabat dalam rangka pendidikan dan pelatihan profesional, saling kunjung dan riset bersama, pertukaran data ilmiah dan teknologi, para ahli, teknis, pelatih, dan bentuk kerja sama teknis lainnya, peningkatan kerja sama antara institusi dalam bidang teknologi pertahanan dan industri kedua negara, kerja sama di bidang latihan pertahanan, serta kerja sama di bidang lain yang menjadi kepentingan bersama kedua negara (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2015).

Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) dan perjanjian ekstradisi merupakan beberapa contoh hasil kerjasama keamanan Indonesia -Tiongkok. Kedua

perjanjian ini merupakan perjanjian yang cukup penting bagi Indonesia terutama dalam menangani kasus buronan yang melarikan diri ke luar negeri.

Terkait penangkapan buronan diluar negeri, perbedaan hukum di masing-masing Negara umumnya menjadi penghalang proses pemulangan buronan di suatu Negara dan untuk mempermudah proses penangkapan dan pemulangan buronan tersebut. Negara umumnya akan melakukan perjanjian ekstradisi hingga kesepakatan terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Negara lain sehingga jika suatu waktu terdapat buronan yang melarikan diri ke luar negeri dan secara kebetulan berada di wilayah Negara yang sudah ada perjanjian ekstradisinya akan dengan mudah dilacak dan dideportasi ke Negara asal buronan tersebut. Dalam bidang hukum dan keamanan, Indonesia -Tiongkok sudah melakukan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan perjanjian ekstradisi. Berikut penjelasan tentang perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan perjanjian ekstradisi.

a) Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters (MLA) Indonesia –Tiongkok*

Di Indonesia, peraturan terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sudah tertuang dalam UU No.1 Tahun 2006 dan berlaku sejak 3 Maret 2006. UU menjadi dasar dan acuan pemerintah Indonesia dalam melakukan perjanjian terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (MLA) dengan negara lain. Sulitnya penelusuran dan pengembalian aset tindak pidana terutama

yang terkait dengan pencucian uang membuat pemerintah Indonesia perlu melakukan kerjasama dengan negara lain. Saat ini negara yang sudah melakukan perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan pemerintah Indonesia diantaranya Australia, Tiongkok, Korea dan Amerika Serikat.

Perjanjian terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Tiongkok sudah ditandatangani pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 meski baru diratifikasi DPR pada tahun 2006. UU Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) Indonesia –Tiongkok secara resmi tertuang dalam UU No.8 Tahun 2006 (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2013).

Objek dari Perjanjian terkait Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara lain, pengambilan dan pemberian barang bukti. Ini termasuk pernyataan, dokumen, catatan, identifikasi lokasi keberadaan seseorang, pelaksanaan permintaan untuk pencarian barang bukti dan penyitaan, pencarian, pembekuan, dan penyitaan aset hasil kejahatan, mengusahakan persetujuan orang yang bersedia memberikan kesaksian atau membantu penyidikan di negara peminta bantuan MLA (Syaltout, 2012).

b) Perjanjian Ekstradisi Indonesia –Tiongkok

Saat ini Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara, seperti perjanjian ekstradisi dengan Malaysia, Filipina, Thailand, Australia, Korea, Hongkong, Tiongkok, Vietnan hingga Papua Nugini (Bangonang, 2013). Sedangkan untuk perjanjian ekstradisi Indonesia- Tiongkok

sudah dilakukan sejak tahun 2009. Tepatnya pada tanggal 1 Juli 2009, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia saat itu Hassan Wirajuda dan Menlu Republik Rakyat Tiongkok, Yang Jiechi menandatangani naskah Perjanjian Ekstradisi antara kedua negara di Gedung *Diaoyutai State Guest House*, Beijing (kompas.com, 2009). Naskah perjanjian ekstradisi ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan menjalin hubungan kemitraan strategis antara Indonesia – Tiongkok yang ditetapkan dalam konferensi Asia Afrika pada tahun 2005 (kompas.com, 2009).

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 1 Tahun 1979 Pasal 1, yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu Negara kepada Negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah Negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidananya (Republik Indonesia, 1979). Dalam prosesnya ada tiga tahapan yang harus dilalui dalam proses ekstradisi mulai dari awal sampai dengan dilakukannya penyerahan pelaku kejahatan dari Negara diminta kepada Negara peminta, antara lain :

- Tahap I: Pra Ekstradisi
- Tahap II: Proses Ekstradisi
- Tahap III: Pelaksanaan Ekstradisi (UU dan Hukum, 2008)

3. Kerjasama Indonesia –Tiongkok dalam bidang Kebudayaan, Pariwisata, Pendidikan dan Teknologi.

Selain kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan keamanan antara Indonesia -Tiongkok yang sudah dijelaskan diatas, masih ada beberapa bentuk kerjasama lainnya, diantaranya kerjasama dalam bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan dan teknologi. Bidang kebudayaan dan pariwisata merupakan penyumbang devisa negara yang cukup besar setiap tahunnya bagi kedua negara. Kebudayaan yang beragam dan tempat yang menarik menjadikan kedua negara ini masuk dalam daftar tujuan destinasi di Asia bagi wisatawan dunia.

Pada tahun 2010, kunjungan wisatawan asal Tiongkok ke Indonesia tercatat sebanyak 700 ribu orang, atau meningkat 2 kali lipat dibanding tahun 2009 yang berjumlah 300 ribu orang. Dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan, investasi dan pariwisata Perwakilan RI sampai dengan Oktober 2010 telah melaksanakan 47 kali forum promosi *trade, tourism and investment* dan berbagai kegiatan lainnya untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. Indonesia juga telah berpartisipasi dalam Shanghai *World Expo 2010* pada 1 Mei - 31 Oktober 2010. Expo ini diikuti oleh 241 peserta, yang terdiri dari negara-negara dan organisasi internasional (Kementrian Luar Negeri RI, 2010).

Berdasarkan badan pusat statistik (BPS) pada bulan Mei 2015 sebanyak 793.500 orang dengan presentase 9,97 persen dilakukan oleh wisatawan asal Tiongkok atau sebesar 79.111 orang. Setahun kemudian, dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia bulan Mei 2016 ada 915.200 orang dengan presentase 12,61 persen kunjungan dilakukan oleh wisatawan asal Tiongkok atau

sebesar 115.406 orang. Hal ini berarti setiap tahunnya jumlah wisatawan asal Tiongkok terus meningkat diatas 20 persen (Prodjo, 2016).

Dalam kunjungannya ke Tiongkok pada 2016 lalu, pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengajak pemerintah Tiongkok untuk bekerja sama di sektor wisata dengan mendorong target 10 juta wisatawan dua arah sebagaimana konsesus kedua presiden. Selain itu pemerintah Indonesia juga telah menetapkan aturan bebas visa bagi wisatawan asal Tiongkok.

Disisi lainnya, kerjasama Indonesia- Tiongkok dalam bidang pendidikan teknologi juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, Indonesia-Tiongkok melakukan pertemuan *High Level People to People Exchange Mechanism* di Tiongkok. Sama seperti pada pertemuan pertama pada 2015 lalu, dalam pertemuan ini pemerintah Indonesia berharap Pemerintah Tiongkok dapat bekerja sama meningkatkan kapasitas riset dan teknologi melalui investasi, alih teknologi, pelatihan dan pengembangan produk bersama. Selain itu, pemberian beasiswa Pemerintah Tiongkok kepada mahasiswa Indonesia bisa terus meningkat, terutama untuk jenjang pendidikan tinggi dan pendidikan vokasional berbagai jurusan (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia, 2016).

Salah satu contoh kerjasama Indonesia -Tiongkok dalam bidang pendidikan dan teknologi adalah kerjasama antariksa. kerjasama ini berawal dari keanggotaan dalam organisasi *Asia Pacific Multilateral Cooperation in Space Technology and Applications* (APMCSTA) yang dibentuk Tiongkok pada tahun

1992. Bentuk kerjasama Indonesia -Tiongkok berupa pemberian bantuan kepada peneliti Lapan baik untuk mengikuti training maupun pendidikan bergelar dalam berbagai bidang seperti aplikasi teknologi antariksa, penginderaan jauh, *Satellite Technology and Spacecraft Project Management*, dan lain sebagainya dengan biaya dari Tiongkok (Sudjatmiko, 2012).